

POLITIK KAUM BERSARUNG

(Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dan Pengaruhnya Terhadap Santri dan Masyarakat di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial

Oleh

Sri Rahayu Winaningsih

Nim : 01540577

**PRODI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 15 Oktober 2005

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu Winaningsih
Nim : 01540577
Jur : Sosiologi Agama
Judul skripsi : Politik Kaum Bersarung (Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dan Pengaruhnya Terhadap Santri dan Masyarakat di PP. Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur)

Maka selaku pembimbing / pembantu pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan.

Demikian, mohon maklum adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Oktober 2005

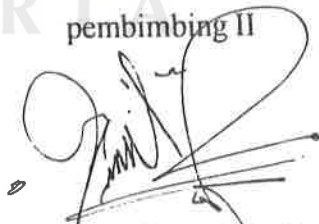
Pembimbing I



Muhammad Amin, Lc, MA

Nip.150253468

pembimbing II



M. Fathan, S. Ag, M. Hum

Nip. 150292262



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto – YOGYAKARTA – Telp. 512156

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1285/2005

Skripsi dengan judul : *Politik Kaum Bersarung (Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dan Pengaruhnya Terhadap Santri dan Masyarakat di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur)*

Diajukan oleh :

1. Nama : Sri Rahayu Winaningsih
2. Nim : 01540577
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : SA

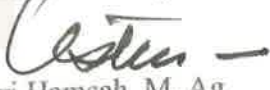
Telah dimunaqasyahkan pada hari : Rabu, tanggal: 7 Desember 2005 dengan nilai : 78,3 (B) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Drs. Moh. Damami, M. Ag
Nip. 150202822

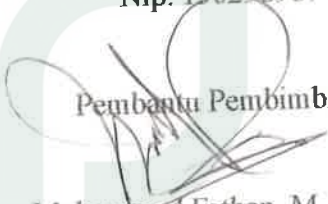
Sekretaris Sidang


Ustadzi Hamsah, M. Ag
Nip. 150298987

Pembimbing/Merangkap Penguji


Muhammad Amin, Lc. MA
Nip. 150253468

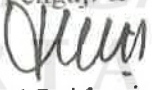
Pembantu Pembimbing


Muhammad Fathan, M. Hum
Nip. 150292262

Penguji I


Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M. Ag
Nip. 150228024

Penguji II


Ahmad Baidowi, M. Si
Nip. 150282516

Yogyakarta, 7 Desember 2005

DEKAN


Drs. H. M. Fahmie, M. Hum
Nip. 150088748



MOTTO

وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. (الاعراف : ١٨١)

Artinya:

Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Lubuk Agung, 1989), hlm. 252.

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini aku dedikasikan untuk:
Kedua Orang Tuaku ; Orang Pertama yang Memperkenalkanku Pada Kenyataan
Kakakku ; Orang yang Mendorongku Segera Belajar Akan Hidup dan Kehidupan
Kedua Adikku ; Orang yang Menemaniku Belajar Tentang Arti Kehidupan
Juga Untuk "My Soulmate" ; Thank's For All*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir akademik ini. Tiada kelebihan, “kebenaran”, dan ketelitian dalam skripsi ini selain daripada pertolongan-Nya. Tiada kelemahan, kekurangan, dan kelalaian yang ada dalam skripsi ini selain dari penulis sendiri. Shalawat serta salam selalu penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menebar lentera kehidupan bagi manusia serta segenap alam.

Penulisan tugas akhir akademik ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun skripsi ini berjudul Politik Kaum Bersarung (Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dan Pengaruhnya Terhadap Santri dan Masyarakat di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur).

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, dari pergumulan pemikiran sampai pada tingkat teknis penulisan skripsi ini, untuk itu penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Moh. Fahmi, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Muhammad Amin, Lc, MA, dan bapak M. Fathan, S. Ag, M. Hum, selaku pembimbing yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab membimbing dan memberi masukan serta koreksi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar kuliah "*Sosiologi Agama*" yang sudah menambah banyak wacana baru bagi penulis.
4. Segenap karyawan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dimana dengan "keramahannya" telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak.
5. Teman-teman kost "astri bintang sembilan", terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
6. Semua pihak yang telah membantu sepenuhnya penyelesaian penulisan skripsi ini yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya mampu berdo'a agar segala bantuan, pertolongan dan jerih payah mereka semoga mendapat imbalan dari Allah SWT. semoga juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan kalangan pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 9 Oktober 2005

Penulis

Sri Rahayu Winaningsih
NIM: 01540577

ABSTRAK

Pesantren dalam banyak hal merupakan kawasan yang memiliki tipologi tersendiri sehingga dikatakan sebagai sebuah sub-kultur pada masyarakat. Kiai sebagai pimpinan pesantren memiliki kewenangan yang besar dan ditunjang dengan jaringan antar pesantren menjadikan posisi kiai semakin strategis dalam percaturan politik Indonesia. Dengan pola kepemimpinan kharismatik, kiai ditempatkan sebagai patron dari santri dan masyarakat sekitarnya. Perilaku politik kiai dapat diklasifikasikan dalam kelompok pragmatis, akomodatif, transformatif, dan prinsipalis. Dukungan kiai terhadap partai politik sangat mempengaruhi perilaku dan pilihan politik klien-nya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pesantren tersebut termasuk sebagai pesantren salaf atau tradisional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, interview, dan dokumentasi. Sampling responden meliputi kiai pengasuh pesantren, santri dan masyarakat sekitar pesantren, dan para aktor politik yang terlibat dalam pertarungan politik di pesantren. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis terbuka dengan fokus penelitian lebih banyak perhatian terhadap penggunaan metode wawancara mendalam (*depth interview*).

Dengan mengambil perbandingan kasus pemilu 1999 dan 2004 didapatkan pola perilaku politik kiai pesantren dalam kaitannya dengan pilihan politik santri dan masyarakat sekitar pesantren. Hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa hubungan kiai-santri tidak terputus setelah santri purna belajar di pesantren, dalam waktu-waktu tertentu pertemuan formal kiai-santri kerap dilakukan. Peran kiai pesantren secara signifikan mampu mempengaruhi pilihan politik santri dan masyarakat. Kekuatan pesantren dengan pola kepemimpinan kiai yang cenderung patron-klien menjadikan pesantren sebagai tambang suara dalam setiap kegiatan pemilu. Pendekatan yang dilakukan oleh kiai pesantren tidak sepenuhnya pragmatis, mereka masih mengedepankan faktor moralitas dan ideologi. Sedangkan pada santri dan masyarakat terdapat kesadaran yang sama, mereka memberikan pilihan tidak secara buta pada faktor kedekatan emosional semata. Informasi yang dengan mudah didapat dari berbagai media turut menjadi referensi untuk menentukan pilihan politiknya.

DAFTAR TABEL

Tabel I : Hasil perolehan suara partai pada Pemilu 1999 dan 2004 di kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto	96
Tabel II: Hasil perolehan suara partai pada Pemilu 1999 dan 2004 di desa Mojogeneng kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto	98



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II. PESANTREN DAN POLITIK	21
A. Pesantren dalam Pertarungan Politik	24
B. Kiai di Medan Politik Praktis.....	36
C. Jaringan Kiai dan Pesantren.....	43
BAB III. Gambaran Umum Tentang Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah	
Mojogeneng Mojokerto	51
A. Sejarah Berdirinya PPBH	51
B. Pendidikan di PPBH	59
C. Hubungan Kiai – Santri di PPBH	63
BAB IV. Kalkulasi Politik Kiai Di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah	
(PPBH).....	72
A. Interaksi Antara Kiai dengan Partai Politik.....	77
B. Mobilisasi Pesantren dalam Pemilu Tahun 1999 Dan 2004.....	84
C. Pengaruh Mobilisasi Pesantren Terhadap Perilaku Pemilih.....	91
BAB V. PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa tidak bisa lepas dari dinamika pesantren yang ikut mewarnai setiap perubahannya. Tetapi tidak bisa juga dikatakan bahwa pesantren merupakan media pendidikan pertama kali didirikan di Indonesia seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia. Secara antropologis pesantren dapat dikatakan sebagai basis pertumbuhan Islam tradisional, yakni Islam yang masih terikat kuat dengan pemikiran-pemikiran ahli fiqh, tafsir, hadist, tauhid dan tasawuf yang hidup antara abad ke-7 sampai dengan abad 13 M.¹

Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya, tetapi setelah terjadi banyak perubahan dalam masyarakat, sebagai akibat dari pengaruhnya, definisi di atas tidak lagi memadai, walaupun pada intinya, pesantren tetap berada pada fungsinya yang asli, yang selalu dipelihara di tengah-tengah arus perubahan yang deras.²

¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 1

² Dawam Raharjo, *Pergulatan Dunia Pesantren* (Jakarta: P3M, 1985), hlm. Vii

Di dalam salah satu tulisannya, Dhoffier menyatakan bahwa unsur-unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah kiai, masjid, astana, santri dan kitab kuning.³ Kiai merupakan elemen terpenting dalam sebuah pesantren. Dalam tradisi keilmuan pesantren kiai inilah yang mempunyai peran *transmitter* dari para santri sebagai pewaris ilmu kepada generasi sebelumnya. Secara umum orang yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam disebut sebagai ulama'.

Dari sudut pandang yang berbeda-beda, dunia kiai merupakan dunia yang penuh kerumitan. Karenanya, sangat sulit untuk melakukan generalisasi atas kelompok ulama' tradisional yang ada di masyarakat bangsa kita ini. Istilah kiai, bindere, nun, ajengan dan guru adalah sebutan yang semula diperuntukkan bagi para ulama' tradisional di Jawa, walaupun sekarang kiai sudah digunakan secara generik bagi semua ulama', baik tradisional maupun modernis, di Jawa maupun di luar Jawa.⁴

Dilihat dari fungsi sosiologisnya, Clifford Geertz misalnya, seperti tampak dari judul tulisannya *The Javanese Kiyayi: The Changing Roles of A cultural Broker*. Menyebut kiai sebagai penghubung antara budaya lokal dan budaya asing. Tetapi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang membuat massifnya alur informasi, membuat kiai tidak mungkin lagi untuk menyaringnya. Kiai menjadi kehilangan perannya tersebut, dan kemudian menjadi

³ *Ibid*, hlm. 44-60.

⁴ Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihuwa Umui Kiai Pesantren-Kiai Lunggu di Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. Xiii.

sekedar menjalankan posisi yang sekunder dan tidak kreatif. Kiai akan mengalami kesenjangan budaya dalam masyarakat sekitarnya.

Studi Hiroko Horikoshi agak bersimpangan dengan tesis Geertz. Dalam kajiannya terhadap sosok seorang kiai (ajengan) di Jawa Barat, ia menunjukkan bahwa kiai bisa berperanan kreatif dalam perubahan sosial. Kiai tidaklah berkeinginan meredam akibat perubahan yang terjadi, tetapi justru memelopori perubahan sosial dengan caranya sendiri. Ia bukan melakukan penyaringan informasi, tetapi menawarkan agenda perubahan nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Ia sepenuhnya berperan dalam proses perubahan sosial, justru karena ia *mafhum* bahwa perubahan tersebut merupakan *sunnatullah* yang tidak terelakkan lagi. Persoalan baginya adalah bagaimana kebutuhan akan perubahan ini dapat dipenuhi tanpa merusak jalinan sosial yang telah ada, melainkan justru prosedur dan mekanisme perubahan sosial yang diidealkan.⁵

Model kepemimpinan pesantren bisa diibaratkan sebagai suatu "kerajaan kecil" dengan kiai sebagai sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan dan lingkungannya. kiai sebagai "raja kecil" cenderung otoriter dalam memerankan fungsi kepemimpinannya. Tidak seorang pun santri atau orang lain dapat melawan kekuasaan kiai (dalam lingkungan pesantrennya) kecuali bila ada kiai lain yang dipandang lebih besar pengaruhnya. Para santri selalu mengharap dan berfikir bahwa kiai yang dianutnya merupakan orang yang percaya penuh kepada dirinya sendiri (*self confident*), baik dalam soal-soal pengetahuan Islam, maupun dalam bidang kekuasaan dan manajemen

⁵ *Ibid*, hlm. Vi

pesantren.⁶ Konsekuensi logisnya, informasi apapun yang disampaikan kiai akan diterima dan pesan-pesannya akan disikapi sebagai suatu keharusan.⁷

Dari sudut kewibawaan moral tradisional, kharisma kiai di lingkungannya mampu melahirkan kepatuhan luar biasa di kalangan masyarakat. Realitas kekuasaan dan kewenangan yang ada dalam gagasan beragama akan membentuk agama otoritas (*religion authority*), yakni mempertahankan struktur keagamaan lewat kesetiaan.⁸

Dilihat dari sudut kedudukan sosialnya, kiai adalah seorang guru agama Islam sebagaimana guru agama pada umumnya, tetapi karena peran sosial-budayanya cukup luas maka kiai memiliki peran yang besar.⁹

Meskipun kebanyakan kiai di Jawa tinggal di pedesaan, mereka merupakan bagian dari kelompok elit dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Jawa. Sebab sebagai suatu kelompok, para kiai memiliki pengaruh yang amat kuat di masyarakat Jawa, dan karenanya, ia merupakan kekuatan penting dalam kehidupan politik Indonesia. Hal ini secara sosiologis memang berkaitan erat dengan struktur masyarakat yang cenderung feodalistis. Sementara dalam struktur masyarakat feodalistis, menurut Sartono Kartodirdjo, raja,

⁶ Zamakhsyari Dhoer, *op cit*, hlm. 56.

⁷ Asep Saepul Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama'* (Jakarta: LPJES, 2004), hlm. 38-39.

⁸ Chumaidi Syarief Romas, *Kekerasan di Kerajaan Surgawi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), hlm. 1-2.

⁹ *Ibid*, hlm. 2.

keluarga, para bangsawan serta elit birokrasi dan penguasa berkedudukan sebagai tuan, sedangkan rakyat sebagai abdi.¹⁰

Pesantren dengan kiai sebagai elemen terpenting merupakan figur simbol moral. Ia bukan sekadar gelar intelektual, tetapi terutama representasi dari sebuah integritas. Namun eksistensi kiai sebagai simbol moral kini mulai dipersoalkan. Disamping banyak kiai yang terjun ke politik.

Secara geografis pesantren kebanyakan terletak di daerah pesisir dan pedalaman yang mayoritas merupakan komunitas urban. Dalam masyarakat yang demikian, pesantren mempunyai otoritas yang luar biasa dari masyarakat. Persoalan- Persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat terutama masalah keagamaan, senantiasa dikembalikan rujukannya kepada pesantren melalui otoritas pemimpin pesantren yakni kiai.

Salah satu fungsi pesantren yang sampai saat ini belum berubah adalah fungsi pesantren sebagai institusi keilmuan, dan sebagai institusi keilmuan tentunya pesantren memiliki fungsi strategis dalam melakukan *empowering* melalui peran *educatifnya*.

Jawa Timur bisa dibilang sebagai pusat pondok pesantren di Jawa bahkan di Indonesia. Pondok pesantren Bidayatul Hidayah yang didirikan oleh KH. Yahdi Mathlab Almarhum adalah salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, tepatnya berada di desa Mojogeneng kecamatan Jatirejo kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Pondok pesantren ini merupakan pesantren yang bersifat

¹⁰ Asep Saepul Muhtadi, *op cit*, hlm 38-39

pesantren tradisional¹, dimana seluruh kebijakan dan keputusan diserahkan kepada kiai sebagai pimpinan.

Pada lingkungan pesantren Bidayatul Hidayah ini, segala permasalahan baik itu masalah sosial, budaya, politik terutama masalah agama akan dikembalikan atau dirujuk pada kiai. Semenjak pemilu 1999 dan 2004, ada suatu kebiasaan dimana beberapa kiai mengundang masyarakat sekitar kerumahnya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakatnya tentang pemilu.

Tidak hanya sampai di situ, bahkan beberapa kiai memberikan fatwa terhadap masyarakat tentang partai apa dan nomor berapa yang didukung oleh kiai. Dari situ kiai akan meminta dukungan kepada masyarakat agar mereka juga memilih partai yang didukung oleh kiai. Di mana bagi masyarakat juga santri di pondok pesantren Bidayatul Hidayah segala yang dilakukan kiai itu merupakan suatu kebenaran, karena kiai bagi mereka adalah pewaris para Nabi. Jadi mereka akan melakukan apa saja yang difatwakan oleh kiai, baik itu masalah agama, sosial, maupun mengenai politik.

¹ Zamakhsyari Dhofier, *op cit*, hlm. 43.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas menjadi sangat penting untuk memberikan arah dan batasan yang akurat bagi penulis untuk mengangkat politik kaum bersarung menjadi sebuah bahan kajian aktual. Lebih jauh penulis ingin melihat secara mendalam sejauh mana perilaku politik pesantren dalam pemilihan umum yang telah berlangsung.

Melihat begitu beragamnya dan banyaknya dunia pesantren yang ada di Jawa Timur khususnya, dan di Indonesia pada umumnya, maka demi maksimalitas tujuan yang hendak dicapai, penulis menspesialisasikan penelitiannya pada pondok pesantren Bidayatul Hidayah yang terletak di Mojokerto Jawa Timur. Pondok pesantren Bidayatul Hidayah ini merupakan salah satu pondok pesantren yang merupakan pesantren konservatif atau pesantren tradisional.

Secara mendetail permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku kiai sebagai elit pesantren dalam mengarahkan pilihan partai politik tertentu kepada santri dan masyarakat sekitar ?
2. Seberapa besar pengaruh perilaku kiai sebagai elit pesantren dalam mengarahkan pilihan partai politik tertentu terhadap perilaku pemilih ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan rumusan masalah sebagaimana diatas, penelitian ini berusaha untuk melihat dan mengkaji secara kritis tentang perilaku politik di pondok pesantren, terutama menyangkut persoalan bagaimana kiai, memberikan pemahaman politik terhadap santri dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perilaku pemilih dalam pemilu.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini merupakan sumbangan terhadap pemahaman politik di dunia Islam pada umumnya dan dunia pesantren khususnya. Secara praktis, pemahaman tentang politik kaum bersarung diharapkan mempunyai implikasi terhadap perilaku politik di dunia Islam pada umumnya dan dunia pesantren khususnya. Disamping itu juga untuk menambah khazanah perpustakaan tentang politik kaum bersarung yang dirasa sudah tidak sedikit dijumpai saat ini.

D. Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pustaka sebagai acuan. Menurut tinjauan penulis, penelitian yang secara khusus membahas tentang perilaku politik kiai di wilayah Mojokerto memang belum ada, tetapi kajian atau tulisan tentang kiai secara umum sudah banyak dilakukan.

Dari buku yang berjudul *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, karya Zamakhsyari Dhoefier, telah disampaikan bahwa kepemimpinan

seorang tokoh agama atau kiai umumnya berfondasi pada pengakuan masyarakat. Pengakuan tersebut sudah barang tentu karena yang bersangkutan memiliki kelebihan dan kemampuan terutama masalah keagamaan. Dengan kedalaman agamanya, kiai seringkali dilihat sebagai orang yang mampu mengetahui rahasia alam dan keagungan Tuhan. Tetapi uraian itu lebih bersifat umum. Untuk itu penulis mencoba melalui penelitian ini akan membahas yang lebih khusus yaitu bagaimana perilaku kiai di pondok pesantren Bidayatul Hidayah dalam berpolitik.

Sedangkan didalam buku, *Kiai dan Perubahan Sosial*, karya Hiroko Horikoshi, menjelaskan besarnya peran seorang kiai tergantung pada kepribadian kiai itu sendiri. Dengan kepribadian yang mengagumkan sebagai seorang pemimpin keagamaan, seorang kiai akan menunjang keberhasilan masyarakat dalam usaha dan perjuangan agama. Dalam hal ini penulis mencoba melihat perilaku politik kiai yang sekarang ini telah ikut berpartisipasi di tengah persoalan politik di wilayah Mojokerto.

Begitu pula buku *Pesantren Dan Pembaharuan*, yang diedit oleh Dawam Raharjo mencantumkan tulisan Abdurrahman Wahid yang berjudul "*Pesantren Sebagai Subkultur*", yang menegaskan betapa besar pengaruh seorang kiai dalam komunitas pesantren dengan ilmu yang supranatural. Dalam image masyarakat pendukungnya (pesantren) kiai merupakan elit religius pesantren. Untuk itu dalam penelitian ini penulis juga mencoba membahas tentang perilaku politik kiai dan pengaruhnya terhadap santri dan masyarakat sekitarnya.

Kepemimpinan kiai-ulama' di pondok pesantren adalah sangat unik, karena mereka memakai sistem kepemimpinan pra-modern. Relasi sosial antara kiai-ulama'-santri dibangun atas landasan kepercayaan, bukan karena patron-klien sebagaimana dilakukan masyarakat umumnya. Ketaatan santri kepada kiai-ulama' lebih dikarenakan mengharapkan *harokah (grace)*, sebagaimana difahami dari konsep sufi.¹² Sebaliknya dengan pernyataan diatas, dalam bukunya Sukamto yang berjudul *Kepemimpinan Kiai*, James C. Scoot menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara kiai dan santri adalah hubungan yang bersifat patron-klien.¹³

Khoiro Ummatin dalam bukunya *Perilaku Politik Kiai*, menjelaskan bagaimana partisipasi seorang kiai sebagai elit pesantren dalam kancah perpolitikan Indonesia, dan bagaimana pilihan partai-partai tertentu seorang kiai yang bertempat di pondok induk bisa mempengaruhi pondok-pondok disekitarnya atau suatu pondok yang masih punya hubungan dengan pondok induk, baik itu keluarga maupun santrinya.

Khoiro Ummatin menulis *Perilaku Politik kiai* dengan mengambil sample seluruh pondok pesantren daerah Yogyakarta, mengulas banyak tentang kiprah kiai dalam kancah perpolitikan dimana kiai disitu punya peran aktif dalam partai-partai politik tertentu. Dan penelitian ini akan membicarakan perilaku kiai dalam berpolitik sebagaimana Khoiro Ummatin, tetapi penelitian ini mengambil sample di pondok pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur dimana

¹² Marzuki Wahid dkk, *Pesantren Dan Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 14.

¹³ Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 77-78

para kiai disini memulai aksinya dalam berpolitik semenjak pemilu 1999. Dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya mereka belum ikut terjun langsung dalam persoalan politik.

Penelitian ini juga akan membicarakan seberapa jauh seorang kiai sebagai elit pesantren dengan kharismanya yakni keunggulannya dalam pengetahuan agama membawa masyarakatnya kepada satu partai politik tertentu yang menjadi pilihan kiai.

E. Kerangka Teori

Welburn menyatakan bahwa perilaku politik kiai pesantren dalam sudut pandang sosiologi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perilaku sosial atau tindakan sosial terutama yang berkaitan dengan kehidupan politik. Oleh karena itu, tindakan sosial di sini memiliki arti luas, menyangkut semua kelompok sosial, perilaku sosial, dan akses kepentingan baik secara kolektif maupun individual.¹⁴

Sebelum sampai pada pembahasan perilaku politik kiai, terlebih dulu akan dikemukakan batasan perilaku politik. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan, bahwa perilaku politik akan ditempatkan sebagai bagian penting untuk menjelaskan politik kiai pesantren.

Perilaku politik diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan

¹⁴ Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 30-31.

adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua yaitu: fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.¹⁵

Perilaku politik kiai pesantren, mempunyai arti subyektif memiliki tujuan tertentu dan bukan sebagai perilaku yang muncul secara kebetulan. Sehingga tindakan-tindakan kiai pesantren dalam berbagai perilaku sosial dan politik, dapat digolongkan pada tingkatan-tingkatan atau tipe-tipe tindakan sosial yang telah dirumuskan oleh Max Weber sebagaimana berikut:

Pertama, rasionalitas instrumental yang artinya bahwa tingkat rasionalitas ini meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

Kedua, rasionalitas yang berorientasi nilai artinya bahwa alat-alat hanya merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar, tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya.

Ketiga, tindakan tradisional dimana tindakan ini merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat non-rasional, dalam artian tindakan yang memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

Keempat, tindakan afektif artinya tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis.

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 131

ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya.¹⁶ Di tengah-tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi. Sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutan paut dengan proses politik.¹⁷

Tindakan dan proses politik yang melibatkan kiai pesantren sebagai wujud partisipasi sebagai warga negara bisa dilakukan dengan berbagai bentuk. Meminjam istilah David E. Apter, tindakan politik meliputi proses pembentukan pendapat politik, kecakapan politik, dan cara orang menyadari peristiwa-peristiwa politik.¹⁸

Dasar pemikiran dari ilmuwan politik tersebut sekaligus menjadi barometer bagi kiai pesantren dalam menentukan sikap politik mereka, termasuk dalam menentukan pilihan partai politik. Perilaku memilih partai politik bagi kiai pesantren akan memiliki keterkaitan dengan empat faktor yaitu: kekuasaan, kepentingan, kebijaksanaan, dan budaya politik.¹⁹

Faktor kekuasaan, sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Faktor kepentingan, yakni tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok politik. Faktor kebijaksanaan, sebagai hasil dari interaksi antara

¹⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M. Z. Lawang (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 219-222.

¹⁷ Ramlan Surbakti, *op cit*, hlm. 15.

¹⁸ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, terj. Setawan Abadi (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 209-210.

¹⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 49

kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan. Faktor budaya politik, sebagai orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik.

Pluralitas perilaku politik umat Islam termasuk kiai pesantren, kalau dicermati lebih lanjut setidaknya terdapat empat perbedaan sikap politik yang terjadi dikalangan politisi Islam.

Pertama, kelompok yang berpandangan pragmatis. Mereka meninggalkan label ideologis dalam pemikiran dan sikap politiknya. Dalam berpolitik mereka lebih suka mengintegrasikan diri dengan kekuasaan atau bahkan masuk dalam struktur kekuasaan itu sendiri.

Kedua, kelompok akomodatif dimana kelompok ini mempunyai pemikiran dan sikap politik yang umumnya lebih reseptif dan kompromis terhadap pemerintahan sekalipun tidak selalu mengintegrasikan diri dalam kekuasaan.

Ketiga, kelompok trasformatif yaitu kelompok yang memiliki komitmen terhadap perubahan yang mendasar, tapi menolak cara-cara radikal atau revolusioner.

Keempat, kelompok prinsipalis adalah kelompok yang menghendaki ditegakkannya prinsip-prinsip dasar yang diyakini bersumber dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Pemikiran dan sikap politiknya cenderung skriptualis dan sangat kritis terhadap perubahan²⁰

²⁰ Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gemma Insani Press, 1996), him. 334-335.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru. Dapat pula penelitian diartikan sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia. Hasrat ingin tahu inilah yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan penelitian. Jadi mengadakan penelitian adalah mempertanyakan sesuatu hal untuk mendapatkan jawabannya.

a. Jenis dan Metode Penelitian

Studi ini bersifat sosiologis yang bergerak menurut penelitian kualitatif yang dimaknai dengan serangkaian proses kegiatan atau menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis dan praktis.²¹

Sementara Kirk dan Miller memandang suatu penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar menyorot interaksi manusia dengan sesamanya dalam bahasa, peristilahan dan kawasan sendiri, sedangkan maksud dari penelitian kualitatif adalah menemukan unsur-unsur atau pengetahuan yang belum ada dalam teori yang berlaku.²²

Dalam studi ini, penelitian kualitatif akan dioperasikan melalui analisis deskriptif, dengan melakukan reinterpretasi secara obyektif tentang fenomena sosial yang terdapat dalam permasalahan yang diteliti.²³ Jadi, pergerakannya tidak

²¹ Hadari Nawawi, *Instrument Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1995), hlm. 209.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

²³ Jacob Viedenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 34.

hanya sebatas pengumpulan dan penyusunan data, tapi mencakup analisis dan interpretasi tentang data itu.²⁴

Nazir mendefinisikan penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reliabilitas. Analisnya dikerjakan berdasarkan data *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung. Tujuannya adalah menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menunjukkan frekuensi penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.²⁵

Secara fundamental, dapat dikatakan bahwa sebuah skripsi adalah representasi obyektif terhadap fenomena yang dikaji. Hal ini membuat suatu karya ilmiah mengalami kesulitan untuk menghindari unsur subyektifitas, sehingga tidak dapat dikatakan suatu studi yang benar-benar obyektif, akan tetapi suatu studi dapat diterima sebagai karya ilmiah sepanjang dimensi obyektifitasnya. Oleh karena itu, peneliti harus mengontrol diri untuk tidak bertindak terlalu subyektif, dalam arti bahwa ia tidak mencampuradukkan pendapatnya dengan kenyataan-kenyataan fenomena dalam pola maupun materi deskripsi.²⁶

²⁴ Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1997), hlm. 131.

²⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 105.

²⁶ Winarno Surachmad, *op cit*, hlm. 133.

b. Jenis Data dan Teknik Pengumpulannya

Studi ini menggunakan data kualitatif. Ukuran data kualitatif adalah logika dalam menerima atau menolak sesuatu yang dinyatakan berupa kalimat yang dirumuskan setelah mempelajari sesuatu itu secara cermat. Data kualitatif tidak memiliki pembanding yang pasti, karena kebenaran yang ingin dibuktikan bersifat relatif. Bentuk dapat berupa pandangan atau pendapat, konsep-konsep, keterangan, kesan-kesan, tanggapan-tanggapan dan lain-lain tentang sesuatu atau keadaan yang berkaitan dengan kehidupan manusia.²⁷

Data ini digali dari metode-metode sebagai berikut: *pertama*, metode observasi. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁸ Sebagaimana arti dari metode observasi tersebut, peneliti mengadakan penelitian langsung dilapangan. Adapun langkah yang akan dilaksanakan sebagai tahap awal dalam serangkaian observasi ini adalah dengan cara *invention*, yaitu observasi secara menyeluruh terhadap fenomena yang akan diteliti dengan melakukan pelacakan terhadap penelitian terdahulu dan fenomena lapangan yang akan dikaji untuk memperoleh fokus penelitian.²⁹ Metode ini digunakan untuk melihat seberapa jauh ketaatan santri dan masyarakat terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kiai. Dan bagaimana sikap kiai memberikan solusi-solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh santri juga

²⁷ Hadari Nawawi, *op cit*, hlm. 209.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 136.

²⁹ Ali Maschan Moesa, *Kiai dan Politik, Wawancara Civil Society* (Surabaya: LEPKISS, 1999), hlm. 15.

masyarakat sekitar, baik masalah sosial, budaya, ekonomi, maupun masalah politik.

Kedua, metode interview yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee).³⁰ Wawancara ini dilakukan terhadap kiai sebagai elit pesantren dan santri juga masyarakat sekitarnya, dengan menggunakan interview guide. Wawancara ini dilakukan secara berselang seling dengan observasi.

Ketiga, dengan menggunakan metode dokumentasi, yakni suatu penelitian yang ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumentasi.³¹ Metode ini merupakan alat pengumpul data sekunder untuk mencari data yang berasal dari dokumen yang berguna untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari metode sebelumnya, dan untuk mengambil data dari dokumen yang ada hubungannya dengan kebutuhan data mengenai gambaran seperti hasil perolehan suara pemilu tahun 1999 dan 2004.

Keempat, yakni metode analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil interview, observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang obyek penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.³² Metode analisis data ini merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dan diinterpretasikan secara lebih spesifik. Teknik tersebut dapat juga

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

³¹ *Ibid*, hlm. 133.

³² Lexi J. Molcong, *op cit*, hlm. 36

disebut sebagai teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bog dan Taylor metode deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.³³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman akan isi dan esensi penulisan penelitian ini, serta untuk memperoleh penyajian yang serius dan terarah dengan mengacu pada metode penelitian diatas, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Pertama, adalah pendahuluan yang menguraikan argumentasi seputar pentingnya studi yang dilakukan. Bagian ini merupakan bab pertama yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dilanjutkan bab *kedua*, dalam bab ini akan dibicarakan tentang pesantren dan politik praktis yang meliputi, pesantren dalam pertarungan politik, kiai dimedan politik praktis, dan jaringan kiai dan pesantren.

Bab *ketiga*, dalam bab ini akan dibicarakan tentang obyek lokasi dalam penelitian ini yakni, gambaran umum tentang pondok pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur yang meliputi: sejarah berdirinya pondok

³³ *Ibid*, hlm. 3.

pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur, pendidikan di pondok pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur, dan hubungan kiai-santri di pondok pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur.

Bab *keempat*, akan menyajikan pembahasan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, kalkulasi politik kiai di pondok pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur. Bagian ini akan mengulas tentang interaksi antara kiai dengan partai politik, mobilisasi pesantren dalam pemilu 1999 dan 2004, kemudian pengaruh mobilisasi pesantren dalam pemilu 1999 dan 2004 terhadap perilaku pemilih.

Terakhir atau bab *kelima* dalam tulisan ini berisi penutup yang berupa upaya menarik benang merah atau kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian singkat tentang Politik Kaum Bersarung (Studi Kasus Perilaku Politik Kiai Dan Pengaruhnya Terhadap Santri Dan Masyarakat Di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur), maka dapat diambil beberapa benang merah yang semoga dengan itu semua yang berkepentingan dengan tulisan pendek ini dapat mencari nilai tersendiri yang mungkin akan didapat:

1. Dari hasil penelitian memperlihatkan bagaimana para kiai pesantren Bidayatul Hidayah Mojogeneng memerankan diri sebagai sosok elit dalam masyarakat. Dengan besarnya klien yang mereka miliki, baik berupa alumni maupun jaringan kekerabatan pesantren dapat dijadikan sebagai unsur untuk meningkatkan *bargain* politik kiai. Dengan sosialisasi dan pola komunikasi informal yang dibangun secara intensif mampu memberikan dukungan suara dalam perhelatan pemilu. Walaupun tidak secara vulgar menunjukkan afiliasi politiknya, isyarat-isyarat politik mereka mampu diterjemahkan oleh klien-nya dengan memberikan pilihan politik yang memiliki keterikatan-keterikatan tertentu, seperti ikatan historis, kultural, ideologi, kesamaan posisi sebagai kelompok yang sebelumnya termarginalkan oleh struktur negara. Pesan-pesan politik mereka sampaikan pada setiap momen yang mereka hadiri, termasuk kehadiran mereka dalam kegiatan kampanye partai

politik. Hingga saat ini kiai pesantren masih dianggap sebagai salah satu referensi dalam menentukan pilihan politik bagi para klien-nya.

Secara umum perilaku politik kiai pesantren dapat dikategorikan pada perilaku politik akomodatif, dimana mereka bisa menerima kehadiran semua kelompok. Perilaku politik akomodatif itu juga ditampakkan dengan tidak melakukan afiliasi politik praktis.

2. Hasil perolehan suara pada dua pemilu terakhir menunjukkan bahwa mobilisasi yang dilakukan oleh kiai cukup berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Pengaruh itu dapat dilihat, disaat kiai pesantren turun langsung di arena kampanye, maka akan diikuti langsung oleh mobilisasi santrinya, sebaliknya dengan yang terjadi di pemilu 2004, ketika kiai tidak lagi turun langsung di arena kampanye, maka mobilisasi maupun perolehan suara PKB mengalami penurunan. Turunnya suara PKB di desa Mojogeneng dan secara umum di kecamatan Jatirejo pada pemilu 2004 disebabkan beberapa hal disamping perilaku kiai yang cukup berpengaruh terhadap perilaku pemilih, yakni masyarakat yang semakin cerdas dalam menentukan pilihan-pilihan mereka dan kekecewaan mereka terhadap personal mantan anggota dewan kemarin yang mereka anggap tidak bisa amanah.

B. Saran

1. Pesantren merupakan lembaga pencetak kader-kader penerus dan pemimpin yang memiliki kualitas penguasaan ilmu keagamaan tekstual maupun kontekstual yang mumpuni, karenanya perlu terus mengadakan

penyempurnaan sistem pembelajarannya agar dapat mengimbangi akselerasi sosial kemasyarakatan. Keberadaan pesantren pada dasarnya adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut tanpa harus meninggalkan “kekhasan” pesantren yang telah diakui sebagai watak aslinya, semisal pengajaran kitab klasik dan metode pengajarannya yang egaliter.

2. Interaksi politik yang dibangun antara kiai pesantren dengan partai politik tidak harus sepenuhnya mengikuti *adagium* politik “tidak ada sekutu abadi kecuali kepentingan abadi”, sebab bila itu terjadi maka pesantren sebagai salah satu kekuatan moral bangsa akan ikut hilang. Potensi pesantren untuk menjadi kelompok penekan (*pressure group*) dengan kapasitas moralnya cukup potensial mengingat besarnya jaringan kerja antar pesantren. Dengan demikian kiai pesantren bisa dijadikan panutan dalam sikap dan tindakan politik bangsa secara keseluruhan.
3. Perlu pendidikan politik bagi para santri pesantren. Jika selama ini secara kuantitas politisi yang berangkat dari pesantren masih terhitung kecil dibandingkan dengan politisi dengan latar belakang selain pesantren, salah satu sebabnya adalah karena kurangnya motivasi dan pengetahuan tentang perpolitikan yang mereka miliki selama menimba ilmu di pesantren. Dengan penguasaan ilmu keagamaan dan ditunjang dengan pengetahuan sosial politik yang cukup dapat dipastikan para politisi dengan latar belakang pesantren akan memiliki karakteristik tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES. 1996
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 2003
- Czudnowski, Moshe M. *Comparing Political Behavior*. Sage library of Social Research. 1976
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES. 1982
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LkiS: 1999
- Enha, Ilung S. *Sangkan Besi Agama: Tafsir Sang Kiai Versi Malinkundang*. Yogyakarta: Alenia. 2003
- Fealy, Greg dan Greg Barton (ed). *Tradisionalisme Radikal*. Yogyakarta: LKIS. 1997
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco. 1988
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1993
- Hamid, Abdul dan Nur Hidayat (ed). *Prespektif Baru Pesantren dan Pengembangan Masyarakat*. Surabaya: Triguna Bhakti. 2001
- Horikoshi, Hiroko. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M. 1987
- HS. Hairus Salim dkk. *Tujuh Mesin Pendulang Suara*. Yogyakarta: LKIS. 1999

- Ida, Laode. *Anatomi Konflik: NU, Elite Islam dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia. 1994
- Moesa, Ali Maschan. *Kiai dan Politik, Wacana Civil Society*. Surabaya: LEPKISS. 1999
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 1998
- Muhtadi, Asep Saepul. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama'*. Jakarta: LP3ES. 2004
- Nawawi, Hadari. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press. 1995
- Nazir, M. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia. 1983
- Prasodjo, Sudjoko dkk. *Profil Pesantren: Laporan hasil penelitian Pesantren Al 'alah dan delapan pesantren lain di Bogor*. Jakarta: LP3ES. 1982
- Raharjo, Dawam. *Pergulatan Dunia Pesantren* Jakarta: P3M. 1985
- Romas, Chumaidi Syarief. *Kekerasan di Kerajaan Surgawi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2003
- Sarbaini, Syahrial dkk. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002
- Saridjo, Marwan. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti. 1983
- Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1989
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES. 1994
- Sukanto. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES. 1999
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1997
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1992
- Thaba, Abdul Azis. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996

- Ummatin, Khoiro. *Perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002
- Viedenberg, Jacob. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1986
- Wahid, Marzuki dkk. *Pesantren Dan Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah. 1999
- Zahra, Abu (ed). *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah. 1999



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERTANYAAN UNTUK KIAI

1. Bagaimana kehidupan/aktivitas belajar di pondok pesantren.
2. Bagaimana hubungan antara santri dengan kiai di luar jam belajar/mengaji.
3. Diantara para kiai pengasuh pesantren adakah yang dianggap senior dan memiliki hak prerogatif dalam menentukan kebijakan pesantren.
4. Apakah kiai aktif berorganisasi.
5. Bagaimana tanggapan kiai terhadap partai politik.
6. Apakah ada upaya pendekatan yang dilakukan oleh partai politik, jika ada kapan itu dilakukan.
7. Apakah kiai secara terbuka menunjukkan pilihan politik kepada masyarakat luas.
8. Apakah kiai ikut mendorong santri/masyarakat dalam melakukan partisipasi politik.
9. Bagaimana tanggapan kiai apabila ada kiai lain di pesantren ini yang memiliki pilihan politik berbeda.
10. Apa alasan kiai melakukan aktivitas politik.

PERTANYAAN UNTUK SANTRI DAN MASYARAKAT

1. Apakah anda memiliki keterkaitan dengan pesantren Mojoegeneng, jika ada apa bentuknya.
2. Bagaimana tanggapan anda terhadap keberadaan pondok pesantren.
3. Apakah anda sering datang ke pesantren, jika ya dalam moment apa.
4. Apakah selama ini pesantren cukup aktif melakukan kerja-kerja politik praktis.
5. Apakah pilihan politik anda sama dengan kebanyakan alumni/masyarakat lainnya.
6. Dalam memilih apakah orientasi politik pesantren juga menjadi referensi anda.
7. Menurut anda apakah kiai melakukan himbauan untuk memilih partai tertentu, jika ya apa bentuknya.
8. Apakah anda berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, misalnya menjadi pengurus parpol atau organisasi kemasyarakatan.
9. Apakah afiliasi politik pesantren mempengaruhi pilihan politik dan kemenangan partai.

PERTANYAAN UNTUK AKTIVIS PARTAI

1. Bagaimana pandangan anda tentang budaya politik dan partisipasi masyarakat di Jatirejo.
2. Apa alasan anda masuk menjadi aktivis partai politik.
3. Pendekatan apa yang anda lakukan untuk meraih dukungan dari masyarakat.
4. Apakah anda melakukan pendekatan khusus terhadap tokoh-tokoh agama/kiai, jika ya mengapa anda melakukannya.
5. Bagaimana tanggapan kiai terhadap partai anda, apa alasannya.
6. Apakah anda berusaha melibatkan kiai ke dalam kepengurusan partai politik anda.
7. Apakah dukungan suara yang anda peroleh dari pesantren cukup memuaskan.
8. Kendala apa yang anda anggap serius saat melakukan pendekatan pada pesantren.
9. Apakah afiliasi politik pesantren mempengaruhi pilihan politik dan kemenangan partai.

PERTANYAAN UNTUK SANTRI DAN MASYARAKAT

1. Apakah anda memiliki keterkaitan dengan pesantren Mojoegeneng, jika ada apa bentuknya.
2. Bagaimana tanggapan anda terhadap keberadaan pondok pesantren.
3. Apakah anda sering datang ke pesantren, jika ya dalam moment apa.
4. Apakah selama ini pesantren cukup aktif melakukan kerja-kerja politik praktis.
5. Apakah pilihan politik anda sama dengan kebanyakan alumni/masyarakat lainnya.
6. Dalam memilih apakah orientasi politik pesantren juga menjadi referensi anda.
7. Menurut anda apakah kiai melakukan himbauan untuk memilih partai tertentu, jika ya apa bentuknya.
8. Apakah anda berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik, misalnya menjadi pengurus parpol atau organisasi kemasyarakatan.
9. Apakah afiliasi politik pesantren mempengaruhi pilihan politik dan kemenangan partai.

PERTANYAAN UNTUK AKTIVIS PARTAI

1. Bagaimana pandangan anda tentang budaya politik dan partisipasi masyarakat di Jatirejo.
2. Apa alasan anda masuk menjadi aktivis partai politik.
3. Pendekatan apa yang anda lakukan untuk meraih dukungan dari masyarakat.
4. Apakah anda melakukan pendekatan khusus terhadap tokoh-tokoh agama/kiai, jika ya mengapa anda melakukannya.
5. Bagaimana tanggapan kiai terhadap partai anda, apa alasannya.
6. Apakah anda berusaha melibatkan kiai ke dalam kepengurusan partai politik anda.
7. Apakah dukungan suara yang anda peroleh dari pesantren cukup memuaskan.
8. Kendala apa yang anda anggap serius saat melakukan pendekatan pada pesantren.
9. Apakah afiliasi politik pesantren mempengaruhi pilihan politik dan kemenangan partai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR INFORMAN

Nama : KH. Shobiri Yahdi
Jabatan : Pengasuh Komplek Ahlal-Quro
Alamat : Mojogeneng Jatirejo Mojokerto

Nama : KH. Mahsus Dawam
Jabatan : Pengasuh Komplek Ar-Robiiyah
Alamat : Mojogeneng Jatirejo Mojokerto

Nama : Agus H. Fathoni Dimiyati
Jabatan : Pengasuh komplek Al-Khodijah
Alamat : Mojogeneng Jatirejo Mojokerto

Nama : Mohammad Tohari, BA
Jabatan : Anggota PKB
Alamat : Dinoyo Jatirejo Mojokerto

Nama : Drs. Heri Ermawan
Jabatan : Calon Anggota DPRD Kab. Mojokerto dari PKB
Alamat : Pandanarum Pacet Mojokerto

Nama : H. Moh. Ishak
Jabatan : Ketua PAC. PPP dan Calon Anggota Legislatif
Alamat : Blimbingsari Sooko Mojokerto

Nama : Ahmad Fathoni
Jabatan : Sekretaris Umum MWC NU Jatirejo dan Ketua GP Anshor
Kec. Jatirejo.
Alamat : Padangasri Jatirejo Mojokerto

Nama : M. Syaifudin
Jabatan : Anggota KPU Mojokerto
Alamat : Blimbingsari Jatirejo Mojokerto

Nama : M. Khoiron
Jabatan : Pengurus IPNU Cabang Mojokerto
Alamat : Sanggrahan Mojosari Mojokerto

Nama : Muta'ahidul Ulum
Jabatan : Santri Senior
Alamat : Wonosari Ngoro Mojokerto

Nama : M. Ikhsan
Jabatan : Alumni PPBH
Alamat : Brangkal Sooko Mojokerto



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 4047
Hal :
Ijin Penelitian

Yogyakarta, 11 Juli 2005
Kepada Yth.
Gubernur Jawa Timur
c.q. Ka. Bakesbanglinmas

di

SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Ushuluddin - UIN "SUKA" Yk
Nomor : IN//DU/TL.03/57/2005
Tanggal : 5 Juli 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **SRI RAHAYU WINANINGSIH**
No. Mhs. : 01540577
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : **POLITIK KAUM BERSARUNG (Studi Kasus Perilaku Politik Kiai-Santri Pada Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur).**

Waktu : 11 Juli 2005 s/d 11 Oktober 2005

Lokasi : Kab. Mojokerto - Prop. Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat,

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ushuluddin - UIN "SUKA" Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 21 Juli 2005

Nomor : 072/ 366 /212.4/2005
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey/Research

K e p a d a

Yth. Sdr. Bupati Mojokerto

di

MOJOKERTO

U.P. Kabakesbang dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 11 Juli 2005
Nomor : 070 / 4047

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Sri Rahayu Winaningsih

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa UIN Suka

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : Politik Kaum Bersarung (Studi Kasus Perilaku Politik Kiai-Santri Pada Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur)

Pembimbing : -

Peserta : -

Waktu : 3(tiga) bulan

Lokasi : Kab. Mojokerto

Penelitian wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
PROPINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Pemajuan HAM



Lampiran :

Yth 1. Sdr. Gubernur DIY di Yogyakarta

2. Sdr. Yang bersangkutan

3. Sdr.



DEPARTEMEN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Masrda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

Nomor : IN/IDU/TL.03/ 77 /2005
 Lamp. :
 Hal : *Permohonan Izin Riset*

Yogyakarta, **5 Juli** 2005

Kepada :
 Yth. **GUBERNUR KEMH YOGYAKARTA**
Cq KETUA BAPEDA DAN KABID BOSPOL
PROVINSI DIY.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan Judul: **POLITIK KEM BERSARUNG (Studi Kasus Prilaku Politik Kial dan pengaruhnya Terhadap Sentri Dan Masyarakat Di PP Bidayatul Hidayah Mojokerto Jawa Timur)** dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami:

Nama : **SRI RAHAYU WIMANINGSIH**
 NIM : **01540577**
 Jurusan : **SUSIOLOGI AGAMA**
 Semester : **VIII**
 Alamat : **SAPIEN GK 1/545 YOGYAKARTA**

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. **POSBOK PESANTREN HIDAYATUL HIDAYAH, MOJOKERTO, JAWAT TIMUR**
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Metode pengumpulan data : **WAWANCARA, OBSERVASI, DOKUMENTASI**
 Adapun waktunya mulai tanggal **10 Juli** s/d **10 September 2005**
 Atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Tanda tangan
 Mahasiswa yang diberi tugas

(**SRI RAHAYU WIMANINGSIH**)
01540577

DEPARTEMEN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA
 Moh. Fahmi, M.Hum
 088748

CURRICULUM VITAE

Nama : Sri Rahayu Winaningsih
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto/31 Januari 1982
Anak Ke : Dua dari Empat Bersaudara
Nama Orang Tua :

- Ayah : H. Ahmad Habibi
- Ibu : Hj. Nur Habibah

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI Syafi'iyah Mojokerto : 1989 - 1995
MTS Syafi'iyah Mojokerto : 1995 - 1998
MAK Bahrul Ulum Jombang : 1998 - 2001
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001 - 2005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

